



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 100.3.2/4197/436.5/2024 tanggal 15 Juli 2024 Perihal : Pemberitahuan;
 2. Surat Walikota Surabaya Nomor : 100.3.2/14436/436.1.2/2024 tanggal 17 Juli 2024 Perihal : Penyampaian Daftar Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025;
 3. Surat Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 10/BPP/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 Perihal : Usulan Judul Propemperda Tahun 2025;
 4. Surat Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 12/BPP/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 Perihal : Usulan Judul Propemperda Tahun 2025;
 5. Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 476/Kom A/Eks/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 Perihal : Usulan Raperda Tahun 2025;
 6. Surat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 310/KOM.C/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 7. Surat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 25/Komisi.D/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 8. Surat Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 08/BK/VI/2024 tanggal 19 Juli 2024 Perihal : Propemperda Badan Kehormatan DPRD Kota Surabaya;
 9. Berita Acara Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya bersama Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya tanggal 22 Juli 2024;
 10. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3/27863/013.2/2024 tanggal 26 Juli 2024 Hal : Penyampaian Konsultasi dan Asistensi Rancangan Keputusan DPRD Kota Surabaya tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025;
 11. Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 29 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dituangkan dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Juli 2024**


**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**

Ttd.

RENI ASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**



Ir. Musdiq Ali Suhudi, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199403 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SURABAYA
NOMOR : 32 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 JULI 2024

A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD KOTA SURABAYA TAHUN 2025

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemerakarsa	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok		V				1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Lingkungan Hidup; 3. Bagian Hukum dan Kerjasama	BPP
2.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		V				1. Bagian Hukum dan Kerjasama 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 3. Dinas Perhubungan	BPP

								4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	
3.	Kesehatan Ibu dan Anak		V					1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Sosial	Komisi D
4.	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		V					1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama; 3. BPJS Ketenagakerjaan	BPP
5.	Perlindungan Masyarakat dalam Kepemilikan Rumah dan/atau Rumah Susun		V					1. Bagian Hukum dan Kerjasama; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 3. Dinas Lingkungan Hidup;	BPP
6.	Perlindungan Perempuan		V					1. Bagian Hukum dan Kerjasama; 2. Dinas Sosial;	BPP

[illegible]

11.	Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas							1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pendidikan; 3. Dinas Sosial	Komisi D
12.	Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat							1. Bakesbangpol; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama	BPP
13.	Energi Biru							1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	BPP
14.	Pengembangan Kampung Cerdas di Kota Surabaya	Mencakup 6 Pilar utama : 1. Smart governance; 2. Smart branding; 3. Smart economy; 4. Smart living; 5. Smart society; 6. Smart environment						1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Dinas Pendidikan; 3. Bagian Hukum dan Kerjasama;	Komisi A
15.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya	Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Surya, Permodalan						1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Badan Pendapatan Daerah. 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Badan Perencanaan Pembangunan	Komisi B

							Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5. Bagian Hukum dan Kerjasama.	
16.	Pengendalian dan Penanggulangan Banjir	Kebijakan yang mengatur pengendalian banjir di Kota Surabaya					1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Dinas Sosial; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 5. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; 6. Bagian Hukum dan Kerjasama.	Komisi C
17.	Perubahan Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Memajukan pendidikan di Kota Surabaya					1. Bagian Hukum dan Kerjasama; 2. Dinas Pendidikan	Komisi D
18.	Hunian Yang Layak	Terkait Bangunan pada penyediaan Rumah Susun					1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	BPP

							<p>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;</p> <p>4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;</p> <p>5. Bagian Hukum dan Kerjasama;</p> <p>6. Dinas Sosial;</p> <p>7. Dinas Lingkungan Hidup.</p>	
19.	Pemajuan Kebudayaan, Kejuangan dan Kepahlawanan Kota Surabaya	Mengatur, menguatkan dan mengembangkan spirit					<p>1. Dinas Kebudayaan, Kemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;</p> <p>2. Bagian Hukum dan Kerjasama</p>	BPP
20.	Perubahan Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame	Penataan Reklame, Jaminan Bongkar, pelayanan perijinan penyelenggaraan	V				<p>1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan</p> <p>2. Badan Pendapatan Daerah;</p>	Komisi A

		reklame di Kota Surabaya						3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga,	
21.	Pengelolaan Susun Rumah Komersial di Kota Surabaya	Pengelolaan Susun Rumah Komersial di Kota Surabaya	V					1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; 5. Bagian Hukum dan Kerjasama; 6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan.	Komisi C
22.	Ketenagakerjaan	Perlindungan Tenaga Kerja di Surabaya dan mewajibkan setiap perusahaan yang	V					1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama.	Komisi D

		ada di Surabaya memperkerjakan Tenaga kerja lokal Surabaya						
23.	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Produk Hukum Daerah di Kota Surabaya					Bagian Hukum dan Kerjasama	BPP
24.	Ijin Penyelenggaraan Rumah Hiburan Umum (RHU)	Penyelenggaraan Rumah Hiburan Umum	V				1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata; 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	BPP
25.	Pengelolaan Sampah Medis	Pengelolaan Sampah Medis	V				1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Lingkungan Hidup; 3. Rumah Sakit Umum Daerah.	BPP
26.	Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif	V				1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Komisi B

							serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	
27.	Penyelenggaraan Angkutan Publik	Penyelenggaraan Angkutan Publik	V				1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 2. Dinas Perhubungan.	Komisi C
28.	Sistem Kesehatan Daerah	Sistem Kesehatan Daerah	V			V	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Badan Perencanaan Pembangunan	Komisi D

								Daerah, Penelitian dan Pengembangan.	
29.	Tempat Hunian Berimbang	Tempat Hunian Berimbang		V				1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanian.	

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ Pemrakarsa	KET
			BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETTERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Transportasi	Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta penataan kembali sistem transportasi	✓		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	✓		Dinas Perhubungan	
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah	Penyesuaian substansi terkait pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus, tempat pengabuan (krematorium) dan penyelenggaraan		✓			✓	Dinas Lingkungan Hidup	

		pemakaman jenazah					
3.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Surabaya	✓		Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTA N/PK.350/5/2017 tentang Obat Hewan	✓	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Revisi 5 tahunan terhadap arahan rencana pola ruang dan struktur ruang utama Kota Surabaya yang dilengkapi dengan arahan peraturan zonasi	✓	Undang-Undang Nomor 26 Tahun Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dilakukan peninjauan kembali RTRW paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun	✓	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

5.	Bangunan	Penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan	✓		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja	✓		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
6.	Penanaman Modal	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	✓		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang	✓		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

				Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah				
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Adanya upaya memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat yang permohonannya jumlahnya paling banyak yaitu akta kelahiran, serta mempercepat target capaian nasional	✓	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan	✓	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

				<p>n dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p>				
8.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Dokumen Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	✓		1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017	✓	Dinas Lingkungan Hidup	

	Hidup Kota Surabaya Tahun 2020 – 2050	Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2020-2050			<p>tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>				
9.	Rencana Pembangunan Industri Kota Surabaya	Penetapan Rencana Pembangunan Industri	✓		<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian</p>	✓		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	
10.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	✓		<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>2. Peraturan Menteri Pekerjaan</p>	✓		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	

					Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolan Air Limbah Domestik				
					3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024				
11.	Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2024- 2049	Grand Design Pembangunan Kependudukan	✓		Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	✓		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

C. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemrakarsa	KET
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	-	-	-	-	-	-	-	-

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,

Ttd.

RENI ASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,

